

HARMONI SEBAGAI PRAKTIK SOSIAL: SEJARAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI DESA PERSATUAN UTARA

HARMONY AS A SOCIAL PRACTICE: THE HISTORY OF MULTICULTURAL SOCIETY IN PERSATUAN UTARA VILLAGE

Syarifanur

Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama – Palu
Surel: syarifanurgunartobadili@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana harmoni sosial diproduksi dan dipertahankan dalam masyarakat multikultural Desa Persatuan Utara, Kecamatan Ongka Malino, Sulawesi Tengah. Berbeda dari pendekatan normatif yang memandang harmoni sebagai nilai ideal atau tujuan sosial, artikel ini menempatkan harmoni sebagai hasil dari proses sejarah dan praktik sosial sehari-hari. Dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial, penelitian ini bertumpu pada sumber lisan, dokumentasi lokal, serta literatur yang relevan untuk menelusuri pembentukan masyarakat multietnis di Persatuan Utara dan mekanisme sosial yang memungkinkan perbedaan etnis, agama, dan budaya dikelola tanpa konflik terbuka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harmoni tidak lahir dari keseragaman atau absennya perbedaan, melainkan dari interaksi ekonomi, kebiasaan sosial, serta negosiasi informal yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan desa. Artikel ini berargumen bahwa stabilitas sosial di Persatuan Utara merupakan produk dari sejarah lokal yang spesifik, bukan semata keberhasilan internalisasi nilai multikulturalisme. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada historiografi Indonesia dengan menekankan pentingnya praktik keseharian dan proses sejarah lokal dalam memahami relasi antarkelompok di masyarakat majemuk.

Kata kunci: harmoni sosial; sejarah sosial; multikulturalisme; masyarakat desa; Sulawesi Tengah; Desa Persatuan Utara

Abstract

This article examines how social harmony is produced and sustained within the multicultural community of Persatuan Utara Village, Ongka Malino District, Central Sulawesi. Rather than treating harmony as a normative value or social ideal, the article conceptualizes harmony as the outcome of historical processes and everyday social practices. Employing a social historical approach, the study draws on oral sources, local documentation, and relevant scholarly literature to trace the formation of a multiethnic society in Persatuan Utara and the social mechanisms through which ethnic, religious, and cultural differences are managed without open conflict. The findings demonstrate that harmony does not emerge from uniformity or the absence of difference, but from economic interactions, shared social routines, and ongoing informal negotiations embedded in village life. This article argues that social stability in Persatuan Utara is the product of a specific local historical trajectory rather than the mere internalization of multicultural values. By foregrounding everyday practices and local historical contexts, this study contributes to Indonesian historiography on pluralism and social cohesion.

Keywords: social harmony; social history; multiculturalism; rural society; Central Sulawesi; Persatuan Utara Village

PENDAHULUAN

Dalam wacana publik Indonesia, harmoni sosial dalam masyarakat multikultural kerap diperlakukan sebagai nilai normatif yang ideal, bahkan sering dirayakan sebagai ciri bawaan komunitas lokal. Narasi semacam ini lazim muncul dalam laporan kebijakan, tulisan populer, maupun karya akademik yang menekankan toleransi dan kerukunan sebagai tujuan sosial. Namun, pendekatan normatif tersebut sering kali mengabaikan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana harmoni itu diproduksi, dijalankan, dan dipertahankan dalam praktik keseharian masyarakat yang majemuk? Pertanyaan ini menjadi penting terutama ketika harmoni dipahami bukan sebagai kondisi alamiah, melainkan sebagai hasil dari proses sejarah dan relasi sosial yang konkret.¹

Kajian-kajian tentang multikulturalisme di Indonesia umumnya bergerak pada dua kecenderungan utama. Pertama, pendekatan normatif-filosofis yang menempatkan harmoni sebagai nilai ideal yang perlu diwujudkan melalui pendidikan, kebijakan, atau internalisasi etika sosial.² Kedua, pendekatan konflik yang menjadikan masyarakat majemuk terutama sebagai arena pertentangan identitas, baik etnis maupun agama, dengan fokus pada momen-momen kekerasan dan disintegrasi.³ Kedua kecenderungan ini sama-sama menyisakan celah analitis: sedikit perhatian diberikan pada komunitas lokal yang relatif stabil dan tidak mengalami konflik terbuka, serta pada mekanisme sosial yang memungkinkan stabilitas tersebut berlangsung dalam jangka panjang.

Artikel ini berangkat dari celah tersebut dengan menempatkan harmoni sebagai praktik sosial historis, bukan sebagai nilai abstrak. Fokus kajian diarahkan pada Desa Persatuan Utara, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebuah desa multietnis yang dihuni oleh kelompok Kaili, Bali, Lombok, Jawa, Bugis, dan Gorontalo.⁴ Keberagaman ini terbentuk melalui proses sejarah yang melibatkan migrasi, transmigrasi, dan mobilitas ekonomi sejak paruh kedua abad ke-20. Alih-alih menjadikan keberagaman sebagai latar deskriptif semata, artikel ini memandangnya sebagai kondisi sosial yang menuntut pengelolaan terus-menerus melalui praktik keseharian masyarakat.

Pendekatan sejarah sosial memungkinkan pembacaan yang lebih tajam terhadap relasi antarkelompok di tingkat desa. Dalam tradisi sejarah sosial, stabilitas dan perubahan dipahami melalui praktik, kebiasaan, dan relasi konkret yang dijalankan oleh aktor-aktor lokal, bukan semata melalui struktur formal atau

¹ Peter Burke, *What Is Cultural History?*, 2. ed., repr, What Is History? Series (Cambridge: Polity Press, 2010), 70–74.

² B. Parekh, “Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory,” *Ethnicities* 1, no. 1 (Maret 2001): 1–6, <https://doi.org/10.1177/146879680100100112>.

³ Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2003), 3–7, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511559341>.

⁴ Pemerintah Desa Persatuan Utara, “Profil Desa Persatuan Utara,” Pemerintah Desa Persatuan Utara, 2024.

kebijakan negara.⁵ Dengan kerangka ini, harmoni tidak diperlakukan sebagai hasil konsensus ideologis, melainkan sebagai produk negosiasi sosial yang berlangsung dalam ruang ekonomi, sosial, dan kultural desa. Aktivitas sehari-hari seperti kerja bersama, interaksi ekonomi, penggunaan ruang publik, serta kebiasaan dalam perayaan dan ritual menjadi arena penting tempat perbedaan dikelola tanpa harus dihapuskan.

Sejumlah studi tentang masyarakat multikultural di Indonesia menunjukkan bahwa absennya konflik terbuka tidak selalu berarti hilangnya perbedaan atau ketegangan.⁶ Sebaliknya, stabilitas sosial sering kali bertumpu pada mekanisme informal yang bersifat lokal dan historis, seperti kesepakatan tidak tertulis, pembagian peran sosial, serta pembiasaan interaksi lintas identitas. Dalam konteks ini, desa tidak dapat dipahami sekadar sebagai unit administratif, tetapi sebagai arena sejarah tempat nilai, praktik, dan relasi sosial diproduksi dan diwariskan lintas generasi.⁷

Dengan bertumpu pada sumber lisan, dokumentasi lokal, serta literatur sejarah dan ilmu sosial yang relevan, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana harmoni sosial diproduksi dan dipertahankan dalam masyarakat multikultural Desa Persatuan Utara? Pertanyaan ini dijabarkan ke dalam pembahasan mengenai asal-usul masyarakat multietnis desa, mekanisme sosial yang mengatur interaksi keseharian, serta faktor-faktor historis yang memungkinkan stabilitas sosial berlangsung tanpa konflik terbuka. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya berkontribusi pada historiografi Indonesia dengan menegaskan pentingnya praktik keseharian dan proses sejarah lokal dalam memahami relasi antarkelompok di masyarakat majemuk.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk menganalisis harmoni dalam masyarakat multikultural Desa Persatuan Utara sebagai proses historis yang terbentuk melalui praktik keseharian dan relasi sosial jangka panjang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelusuran dinamika sosial di tingkat lokal dengan menempatkan aktor, kebiasaan, dan interaksi sehari-hari sebagai unit analisis utama, alih-alih menjadikan harmoni sebagai kategori normatif atau abstrak.⁸

⁵ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 23–27.

⁶ Gerry van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*, Routledge Contemporary Southeast Asia Series 15 (London New York, NY: Routledge, 2007), 12–15.

⁷ James C. Scott, *Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*, Veritas paperback edition, Yale Agrarian Studies (New Haven, CT London: Yale University Press, 2020), 183–85.

⁸ Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, 23–27.

Sumber utama penelitian ini terdiri atas sumber lisan dan dokumentasi lokal, yang dilengkapi dengan literatur sekunder relevan. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan warga Desa Persatuan Utara dari latar belakang etnis dan agama yang berbeda, termasuk tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga yang terlibat langsung dalam aktivitas sosial sehari-hari. Wawancara tidak diperlakukan sebagai fakta positivistik semata, melainkan sebagai ingatan sosial yang merekam pengalaman, persepsi, dan makna yang dilekatkan masyarakat terhadap praktik harmoni dalam kehidupan mereka.⁹

Selain sumber lisan, penelitian ini memanfaatkan dokumen desa, catatan administratif, serta arsip lokal yang berkaitan dengan sejarah pembentukan dan perkembangan Desa Persatuan Utara. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk merekonstruksi konteks historis masuknya kelompok-kelompok etnis ke wilayah desa serta perubahan struktur sosial yang menyertainya. Sumber tertulis ini dibaca secara kritis dan dikontekstualisasikan dengan data lisan untuk menghindari pembacaan yang ahistoris atau normatif.¹⁰

Tahap analisis dilakukan melalui kritik sumber dan interpretasi historis. Kritik sumber diterapkan baik pada sumber lisan maupun tertulis untuk menilai konteks produksi, posisi sosial narasumber, serta kemungkinan bias ingatan. Selanjutnya, data dianalisis secara tematik dengan menelusuri pola-pola interaksi sosial, mekanisme negosiasi informal, serta praktik keseharian yang berkontribusi pada terbentuknya harmoni sosial. Pendekatan ini memungkinkan penulis mengaitkan temuan empiris dengan kerangka historiografis yang lebih luas tanpa mengaburkan kekhasan konteks lokal Persatuan Utara.¹¹

Dengan metode ini, artikel tidak bertujuan untuk mengukur tingkat harmoni atau toleransi secara kuantitatif, melainkan untuk memahami bagaimana harmoni diproduksi, dijalankan, dan dipertahankan sebagai hasil dari proses sejarah dan praktik sosial konkret. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap masyarakat multikultural di Indonesia, khususnya pada level desa yang sering luput dari perhatian historiografi arus utama.

PEMBAHASAN

Asal-usul Masyarakat Multikultural Desa Persatuan Utara

Pembentukan Desa Persatuan Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah migrasi dan transmigrasi di kawasan Ongka-Mepanga, Parigi Moutong, yang sejak

⁹ Alessandro Portelli, *The Death of Luigi Trastulli, and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*, SUNY Series in Oral and Public History (Albany, N.Y: State University of New York Press, 1991), 50–55.

¹⁰ Luise White, *The Comforts of Home: Prostitution in Colonial Nairobi* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2009), 6–9.

¹¹ Burke, *What Is Cultural History?*, 70–74.

dekade 1970-an berkembang sebagai salah satu wilayah agraris baru di Sulawesi Tengah.¹² Secara geografis, Persatuan Utara terletak di bagian utara Kecamatan Ongka Malino dan pada mulanya merupakan Dusun Swakarsa Persatuan Utara, bagian dari Desa Persatuan Sejati.¹³ Pada fase awal, dusun ini hanya dihuni oleh sejumlah kecil kepala keluarga dan berada dalam struktur pemerintahan desa induk. Kondisi ini menempatkan Persatuan Utara sebagai ruang pinggiran secara administratif, tetapi justru menjadi arena penting bagi dinamika sosial di kemudian hari.

Perubahan signifikan terjadi ketika wilayah Ongka-Mepanga dibuka sebagai ruang ekspansi agraria dalam kerangka pembangunan nasional Orde Baru. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa sejak awal 1970-an, negara secara aktif mendorong pemindahan penduduk dari Jawa dan Bali ke wilayah Sulawesi melalui program transmigrasi, dengan tujuan membuka lahan pertanian, mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, dan memperkuat kontrol negara atas wilayah periferi.¹⁴ Dalam praktiknya, kebijakan transmigrasi tidak hanya menghasilkan perubahan demografis, tetapi juga membentuk struktur sosial multietnis yang bertahan hingga kini.

Studi tentang transmigrasi di Mepanga memperlihatkan bahwa pendatang tidak hadir sebagai kelompok homogen yang sepenuhnya terpisah dari masyarakat lokal.¹⁵ Di banyak tempat, termasuk Ongka-Mepanga, transmigrasi berjalan berdampingan dengan migrasi spontan, yakni perpindahan penduduk yang tidak sepenuhnya berada dalam skema resmi negara. Persatuan Utara berkembang dalam konteks ini. Meskipun tidak ditetapkan sebagai unit transmigrasi utama seperti Kotaraya atau Kayu Agung, dusun ini menjadi tujuan penduduk pendatang karena kesuburan tanah dan ketersediaan lahan. Dengan demikian, multikulturalisme di Persatuan Utara merupakan hasil dari pertemuan antara kebijakan negara, dinamika ekonomi lokal, dan strategi hidup masyarakat pendatang maupun penduduk setempat.

Berbeda dengan kawasan transmigrasi yang dirancang dengan pembagian blok pemukiman yang relatif seragam, pertumbuhan Persatuan Utara berlangsung lebih cair dan tidak sepenuhnya terencana. Tidak terdapat segregasi ruang yang kaku antara kelompok etnis. Pola pemukiman yang menyebar dan keterlibatan bersama dalam aktivitas pertanian menciptakan ruang interaksi awal yang intensif. Dalam kajian sejarah pedesaan Indonesia, relasi ekonomi sering kali menjadi

¹² Nyta Wahyuni, "Peran Transmigran Etnis Jawa dalam Mengembangkan Pendidikan di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong" (Skripsi, Universitas Tadulako, 2022), 30–35.

¹³ Pemerintah Desa Persatuan Utara, "Profil Desa Persatuan Utara."

¹⁴ Tania Murray Li, *The will to improve perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia*, Cetakan pertama (Tangerang: Marjin Kiri, 2012), 107–12.

¹⁵ Nyta Wahyuni, "Peran Transmigran Etnis Jawa dalam Mengembangkan Pendidikan di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong," 30–35.

medium awal integrasi sosial sebelum berkembangnya mekanisme sosial dan kultural yang lebih stabil.¹⁶ Pola ini juga dapat ditelusuri dalam sejarah awal Persatuan Utara.

Perubahan demografis yang cepat kemudian melahirkan kebutuhan akan pengelolaan sosial dan administratif yang lebih memadai. Dalam konteks ini, pemekaran Dusun Swakarsa Persatuan Utara menjadi desa definitif pada 2010 dapat dibaca sebagai respons lokal terhadap kompleksitas sosial yang telah terbentuk, bukan sekadar produk kebijakan administratif. Inisiatif pemekaran yang digerakkan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga dari beberapa dusun menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk mengelola keberagaman secara lebih terstruktur. Fenomena ini sejalan dengan temuan studi tentang pemekaran wilayah di Indonesia, yang menunjukkan bahwa pemekaran sering kali berfungsi sebagai mekanisme adaptasi lokal terhadap perubahan sosial dan demografis.¹⁷

Penamaan “Persatuan Utara” mencerminkan kesadaran simbolik masyarakat terhadap kondisi multikultural yang mereka hadapi. Nilai persatuan, keadilan, dan keamanan yang dilekatkan pada nama desa berfungsi sebagai narasi bersama yang diharapkan mampu mengikat kelompok-kelompok berbeda dalam satu kerangka sosial. Dalam perspektif sejarah budaya, simbol dan penamaan semacam ini memainkan peran penting dalam membangun imajinasi kolektif, terutama pada komunitas yang terbentuk dari latar belakang sosial yang beragam.¹⁸

Dengan demikian, sejarah Desa Persatuan Utara perlu dipahami dalam dua lapisan yang saling terkait: pertama, sebagai bagian dari sejarah transmigrasi dan mobilitas penduduk di Sulawesi Tengah, khususnya kawasan Ongka-Mepanga; kedua, sebagai ruang lokal yang secara pragmatis mengelola keberagaman melalui praktik sosial sebelum dan sesudah pemekaran desa. Multikulturalisme di Persatuan Utara bukanlah hasil rekayasa administratif semata, melainkan produk dari sejarah agraria, migrasi, dan konsolidasi sosial yang relatif inklusif. Konteks historis inilah yang menjadi fondasi bagi berkembangnya mekanisme harmoni dalam praktik keseharian masyarakat desa.

Migrasi, Interaksi Sosial, dan Kerja Harmoni dalam Kehidupan Sehari-hari

Harmoni sosial di Desa Persatuan Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah migrasi penduduk yang membentuk struktur sosial desa sejak awal. Sejak dekade 1980-an, wilayah ini mulai dihuni oleh pendatang dari berbagai latar belakang etnis seperti Gorontalo, Bugis, dan Jawa, yang datang untuk membuka lahan pertanian dan menetap secara permanen.¹⁹ Dalam kajian sejarah agraria dan migrasi di

¹⁶ Scott, *Seeing like a State*, 183–85.

¹⁷ Joshua Barker dan Gerry van Klinken, ed., *State of Authority: State in Society in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018), 1–6, <https://doi.org/10.7591/9781501719448>.

¹⁸ Benedict R. O'G Anderson, *Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism* (London New York: Verso, 2006), 6–7.

¹⁹ Pemerintah Desa Persatuan Utara, “Profil Desa Persatuan Utara.”

Indonesia, perpindahan penduduk semacam ini kerap dipahami sebagai strategi ekonomi sekaligus mekanisme pembentukan ruang sosial baru di wilayah pinggiran.²⁰ Beberapa keluarga perintis—Ali Al-Jufri, Musahir, Jaed, Suyoto, dan Hanipan—menjadi bagian dari fase awal pembentukan komunitas multietnis di Dusun Swakarsa Persatuan Utara sejak sekitar tahun 1982, baik melalui migrasi spontan maupun transmigrasi pemerintah yang menjamin pembagian lahan sekitar dua hektar per keluarga.

Sebagaimana diungkapkan oleh Andi Rusdi Yanto, Kepala Desa Persatuan Utara, masyarakat desa ini sejak awal merupakan hasil pertemuan berbagai gelombang migrasi lintas daerah. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberagaman etnis di Persatuan Utara bukan sekadar kondisi demografis, melainkan hasil dari proses sejarah agraria, kebijakan negara, dan mobilitas sosial yang saling berkelindan. Dalam konteks ini, harmoni tidak hadir sebagai konsensus ideologis, tetapi sebagai kebutuhan praktis agar kehidupan bersama dapat berlangsung. Pendekatan semacam ini sejalan dengan pembacaan sejarah sosial yang menempatkan stabilitas sebagai hasil negosiasi keseharian, bukan sebagai kondisi alamiah.²¹

Selain migrasi, perkawinan antar-etnis menjadi mekanisme penting yang memperkuat integrasi sosial. Di Persatuan Utara, pernikahan lintas suku dan agama telah menjadi praktik yang relatif lazim dan diterima secara sosial. Dalam studi antropologi, perkawinan semacam ini dipahami sebagai salah satu cara paling efektif untuk membangun jembatan kekerabatan lintas identitas, sekaligus meredam potensi eksklusivisme etnis.²² Keterangan warga Persatuan Utara yang menyebut bahwa pernikahan antar-etnis “sudah tidak menjadi permasalahan lagi” menunjukkan bahwa relasi kekerabatan berfungsi sebagai medium integrasi yang bekerja secara perlahan namun berkelanjutan.

Peran pendidikan, baik formal maupun non-formal, juga signifikan dalam membentuk kesadaran multikultural. Seorang guru di Desa Persatuan Utara menegaskan bahwa sekolah menjadi ruang penting untuk menanamkan nilai penghargaan terhadap perbedaan sejak usia dini. Temuan ini sejalan dengan kajian sejarah pendidikan dan kebudayaan yang menunjukkan bahwa sekolah di masyarakat majemuk tidak hanya berfungsi sebagai institusi transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai arena pembentukan etika sosial dan identitas kolektif.²³ Pendidikan non-formal—melalui kegiatan seni, kerja bakti, dan pelatihan

²⁰ Li, *The will to improve perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia*, 107–12.

²¹ Burke, *What Is Cultural History?*, 70–74.

²² Fredrik Barth, *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* (Prospect Heights, Ill: Waveland, 1998), 10–15.

²³ Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, ed., *Politik Lokal Di Indonesia* (Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia, 2007), 211–14.

keterampilan—memperluas proses pembiasaan hidup berdampingan di luar ruang kelas.

Agama, dalam konteks Persatuan Utara, berfungsi sebagai kerangka moral yang menopang toleransi, bukan sebagai sumber fragmentasi sosial. Kehadiran pemeluk Islam, Kristen, dan Hindu dalam satu ruang desa diimbangi oleh praktik saling menghormati dan kerja sama dalam aktivitas sosial. Sejumlah kajian tentang agama dalam masyarakat multikultural Indonesia menunjukkan bahwa harmoni lintas agama sering kali dipertahankan melalui praktik keseharian dan otoritas moral informal, bukan melalui dialog teologis formal semata.²⁴ Kesaksian tokoh masyarakat dan tokoh agama Persatuan Utara memperlihatkan pola serupa, di mana agama menjadi dasar etika sosial yang mendorong persatuan.

Ketika gesekan sosial muncul, masyarakat Persatuan Utara cenderung mengandalkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Penyelesaian konflik melalui dialog langsung, mediasi tokoh masyarakat, dan komunikasi informal mencerminkan tradisi lokal dalam mengelola perbedaan. Dalam perspektif sejarah sosial, mekanisme semacam ini menunjukkan berfungsinya otoritas non-negara dalam menjaga ketertiban sosial di tingkat lokal.²⁵ Pendekatan ini memungkinkan konflik diselesaikan sebelum berkembang menjadi pertentangan terbuka yang berbasis identitas.

Upaya menjaga harmoni juga dipelihara melalui kegiatan kolektif, seperti gotong royong, perayaan hari besar, serta aktivitas organisasi pemuda, PKK, dan majelis taklim. Kegiatan-kegiatan ini berfungsi sebagai ruang perjumpaan lintas identitas yang terus memperbarui ikatan sosial. Sebagaimana dicatat oleh Asmiati, kebersamaan dalam kegiatan sehari-hari memperkuat rasa saling ketergantungan dan solidaritas. Dalam kajian tentang masyarakat desa Indonesia, praktik kolektif semacam ini sering dipahami sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan harmoni sosial.²⁶

Dengan demikian, harmoni di Desa Persatuan Utara terbentuk melalui rangkaian praktik sosial yang saling terkait: migrasi dan perjumpaan awal, perkawinan lintas etnis, pendidikan, peran agama, mekanisme penyelesaian konflik, serta kegiatan kolektif. Harmoni tidak hadir sebagai kondisi statis atau bebas dari perbedaan, melainkan sebagai hasil kerja sosial yang terus-menerus dalam konteks sejarah lokal yang spesifik.

Batas-batas Harmoni dan Kerentanannya dalam Perubahan Sosial

²⁴ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2011), 17–21.

²⁵ Barker dan Klinken, *State of Authority*, 1–6.

²⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2000), 85–88.

Pembahasan mengenai harmoni sosial di Desa Persatuan Utara akan timpang jika hanya menekankan keberhasilan pengelolaan perbedaan tanpa menyoroti batas-batas dan kerentanannya. Dalam perspektif sejarah sosial, harmoni tidak pernah bersifat final atau bebas dari ketegangan, melainkan selalu berada dalam kondisi rentan terhadap perubahan struktur sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, bagian ini membahas harmoni di Persatuan Utara bukan sebagai keadaan ideal, melainkan sebagai hasil kerja sosial yang terus-menerus diuji oleh dinamika zaman.

Salah satu batas utama harmoni di Persatuan Utara berkaitan dengan perubahan demografis dan ekonomi. Masuknya penduduk baru—baik melalui migrasi spontan maupun arus ekonomi—berpotensi mengubah keseimbangan relasi sosial yang telah terbentuk. Meskipun hingga kini masyarakat relatif mampu mengelola perbedaan, perubahan akses terhadap lahan pertanian dan sumber daya ekonomi dapat memunculkan ketegangan laten. Sejumlah kajian sejarah agraria menunjukkan bahwa konflik sosial di pedesaan sering kali tidak dipicu oleh perbedaan identitas semata, melainkan oleh ketimpangan distribusi sumber daya yang kemudian dipolitisasi.²⁷ Dalam konteks Persatuan Utara, harmoni tetap bergantung pada kemampuan masyarakat menjaga relasi ekonomi yang relatif adil dan terbuka.

Kerentanan lain muncul dari pergeseran generasi dan perubahan nilai. Generasi yang mengalami langsung fase awal pembentukan desa—melalui migrasi, pembukaan lahan, dan kerja kolektif—memiliki pengalaman historis yang membentuk etos kebersamaan kuat. Namun, generasi muda yang tumbuh dalam kondisi desa yang lebih mapan menghadapi konteks berbeda, termasuk penetrasi media sosial, arus informasi global, dan politik identitas yang berkembang di tingkat nasional. Dalam sejarah sosial, pergeseran generasi kerap menjadi titik rawan ketika nilai-nilai yang sebelumnya dijaga melalui praktik keseharian mulai kehilangan medium transmisinya.²⁸

Selain itu, formalisasi institusi desa juga membawa implikasi ganda bagi harmoni sosial. Di satu sisi, struktur pemerintahan desa yang lebih mapan memungkinkan pengelolaan konflik dan pelayanan publik yang lebih sistematis. Namun, di sisi lain, formalisasi berpotensi menggeser mekanisme informal—seperti musyawarah dan mediasi personal—yang selama ini menjadi penyangga utama harmoni. Jika otoritas formal tidak sensitif terhadap keragaman sosial, kebijakan desa justru dapat memunculkan rasa eksklusi di kalangan kelompok tertentu.

²⁷ James C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven, CT: Yale University Press, 1977), 3–5, <https://doi.org/10.12987/9780300185553>.

²⁸ Karl Mannheim, *Collected Works. 5: Essays on the Sociology of Knowledge*, Digital repr (Abingdon: Routledge, 2007), 286–87.

Fenomena ini telah banyak dicatat dalam studi tentang relasi negara dan masyarakat di tingkat lokal Indonesia.²⁹

Penting pula dicatat bahwa harmoni di Persatuan Utara sangat bergantung pada peran tokoh informal, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Otoritas mereka bersumber dari kepercayaan sosial, bukan dari jabatan formal semata. Ketika figur-firug ini tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat—akibat regenerasi kepemimpinan yang tidak berjalan mulus atau fragmentasi sosial—mekanisme penyelesaian konflik informal berpotensi melemah. Dalam konteks ini, harmoni bukanlah warisan yang dapat diteruskan begitu saja, melainkan harus terus dirawat melalui pembentukan otoritas sosial yang legitim di mata masyarakat.³⁰

Dengan demikian, harmoni sosial di Desa Persatuan Utara memiliki batas dan kerentanan yang nyata. Ia tidak kebal terhadap perubahan struktur ekonomi, dinamika generasi, maupun transformasi institusi sosial. Namun, justru dalam kerentanan inilah terlihat bahwa harmoni merupakan praktik sosial historis, bukan kondisi statis. Selama masyarakat mampu mempertahankan ruang dialog, relasi ekonomi yang relatif adil, serta mekanisme penyelesaian konflik yang inklusif, harmoni tetap dapat diproduksi ulang dalam konteks yang berubah.

Pembacaan kritis ini menegaskan bahwa harmoni di Persatuan Utara bukanlah model universal yang dapat direplikasi begitu saja, melainkan hasil dari sejarah lokal yang spesifik. Kesadaran akan batas dan kerentanan harmoni menjadi penting agar keberagaman tidak direduksi menjadi slogan, tetapi dipahami sebagai proses sosial yang menuntut kerja kolektif berkelanjutan.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa harmoni sosial di Desa Persatuan Utara bukanlah kondisi alamiah yang hadir secara spontan, melainkan hasil dari proses sejarah dan kerja sosial yang berlangsung dalam jangka panjang. Keberagaman etnis, agama, dan budaya di desa ini terbentuk melalui migrasi, transmigrasi, dan mobilitas agraria sejak dekade 1980-an, jauh sebelum Persatuan Utara menjadi desa administratif yang definitif. Dengan demikian, multikulturalisme di Persatuan Utara merupakan realitas sosial yang mendahului institionalisasi desa, bukan produk rekayasa kebijakan semata.

Melalui pendekatan sejarah sosial, artikel ini memperlihatkan bahwa harmoni diproduksi melalui praktik keseharian: interaksi ekonomi lintas kelompok, perkawinan antar-etnis, pendidikan formal dan non-formal, peran agama sebagai kerangka moral, serta mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Praktik-praktik ini bekerja secara simultan dan berulang, membentuk pola relasi

²⁹ Barker dan Klinken, *State of Authority*, 1–6.

³⁰ Hefner, *Civil Islam*, 17–21.

sosial yang memungkinkan perbedaan dikelola tanpa harus dihapuskan. Harmoni, dalam konteks ini, tidak berarti ketiadaan perbedaan atau potensi konflik, melainkan kemampuan masyarakat untuk menegosiasikan perbedaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Artikel ini juga menegaskan bahwa harmoni memiliki batas dan kerentanan. Perubahan struktur ekonomi, dinamika generasi, dan formalisasi institusi desa berpotensi menggeser mekanisme informal yang selama ini menopang stabilitas sosial. Oleh karena itu, harmoni tidak dapat dipahami sebagai warisan statis, melainkan sebagai praktik sosial yang harus terus dirawat dan diproduksi ulang dalam konteks yang berubah. Kesadaran akan kerentanan ini penting agar harmoni tidak direduksi menjadi slogan normatif, melainkan dipahami sebagai proses historis yang menuntut kerja kolektif berkelanjutan.

Secara historiografis, artikel ini berkontribusi dengan menggeser pembacaan harmoni dari ranah normatif ke ranah sejarah praktik sosial lokal. Dengan menempatkan desa sebagai arena sejarah, studi ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial dalam masyarakat multikultural Indonesia tidak selalu bergantung pada regulasi formal atau ideologi multikulturalisme, tetapi sering kali bertumpu pada mekanisme lokal yang bersifat informal, kontekstual, dan historis. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut tentang bagaimana komunitas-komunitas lokal lain di Indonesia mengelola keberagaman mereka dalam lintasan sejarah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Benedict R. O'G. *Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*. London New York: Verso, 2006.

Barker, Joshua, dan Gerry van Klinken, ed. *State of Authority: State in Society in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018. <https://doi.org/10.7591/9781501719448>.

Barth, Fredrik. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Prospect Heights, Ill: Waveland, 1998.

Bertrand, Jacques. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. 1 ed. Cambridge University Press, 2003. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511559341>.

Burke, Peter. *What Is Cultural History?* 2. ed., Repr. What Is History? Series. Cambridge: Polity Press, 2010.

Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2011.

Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, ed. *Politik Lokal Di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Klinken, Gerry van. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. Routledge Contemporary Southeast Asia Series 15. London New York, NY: Routledge, 2007.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2000.

Li, Tania Murray. *The will to improve perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia*. Cetakan pertama. Tangerang: Marjin Kiri, 2012.

Mannheim, Karl. *Collected Works. 5: Essays on the Sociology of Knowledge*. Digital repr. Abingdon: Routledge, 2007.

Nyta Wahyuni. "Peran Transmigran Etnis Jawa dalam Mengembangkan Pendidikan di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong." Skripsi, Universitas Tadulako, 2022.

Parekh, B. "Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory." *Ethnicities* 1, no. 1 (Maret 2001): 109–15. <https://doi.org/10.1177/146879680100100112>.

Pemerintah Desa Persatuan Utara. "Profil Desa Persatuan Utara." Pemerintah Desa Persatuan Utara, 2024.

Portelli, Alessandro. *The Death of Luigi Trastulli, and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*. SUNY Series in Oral and Public History. Albany, N.Y: State University of New York Press, 1991.

Scott, James C. *Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Veritas paperback edition. Yale Agrarian Studies. New Haven, CT London: Yale University Press, 2020.

———. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven, CT: Yale University Press, 1977. <https://doi.org/10.12987/9780300185553>.

White, Luise. *The Comforts of Home: Prostitution in Colonial Nairobi*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2009.